

The Urgency of Indonesia to Ratify the Optional Protocol on the Convention Against Torture (OPCAT) to Eradicate the Practice of Torture Towards the Child who Conflicted with the Law

Author:

Odelia Quena¹ and Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M(HR), Ph.D.²

ABSTRACT

This legal research has the purpose to examine whether the Optional Protocol on the Convention Against Torture is urgently needed to be ratified by the government by looking at Indonesia's compliance in fulfilling the mandate given by the Convention Against Torture as well as other international human rights instruments and national laws in terms of protecting the child who conflicted with the law from the practice of torture. This legal research is using normative approach. This approach is essential to examine the laws, regulations, conventions, treaties, and other literature that are relevant to this topic that is discussed in this legal research.

This legal research concluded that the efforts by the government in eliminating the practice of torture towards the child who conflicted with the law are still low. Based on the research that has been done, the practice of torture towards the child who conflicted with the law still often occurred. However, the government has prepared themselves to ratify the OPCAT. Although there are still many obstacles that make the ratification delayed, such as lack of coordination between the stakeholders and the practice of torture is still common among law enforcers, especially the police.

Keywords: Torture, OPCAT, Child Who Conflicted with the Law, Child, Human Rights, Investigation Process.

¹ Undergraduate student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (IUP 2016)

² Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

Urgensi Indonesia untuk Meratifikasi Protokol Opsional tentang Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT) untuk Memberantas Praktek Penyiksaan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Oleh:

Odelia Quena³ dan Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M(HR), Ph.D.⁴

INTISARI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk membahas apakah Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan sangat dibutuhkan untuk diratifikasi oleh pemerintah dengan melihat kepatuhan Indonesia dalam memenuhi mandat yang diberikan oleh Konvensi Menentang Penyiksaan serta instrumen HAM internasional lainnya dan hukum nasional dalam hal melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dari praktik penyiksaan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini sangat penting untuk memeriksa hukum, peraturan, konvensi, perjanjian, dan literatur lain yang relevan dengan topik ini yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

Penelitian hukum ini menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam menghilangkan praktik penyiksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih rendah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, praktik penyiksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih sering terjadi. Namun, pemerintah telah mempersiapkan diri untuk meratifikasi OPCAT. Meskipun masih banyak kendala yang membuat ratifikasi tertunda, seperti kurangnya koordinasi antara para pemangku kepentingan dan praktik penyiksaan masih sering terjadi di kalangan penegak hukum, terutama polisi.

Kata Kunci: *Penyiksaan, OPCAT, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak, Hak Asasi Manusia, Proses Investigasi*

³ Mahasiswa S1 Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada (IUP 2016)

⁴ Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada